



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata dan Komunikasi Parwisata di Kabupaten Bengkalis

5.1.1 Perencanaan Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjalankan kebijakan keparwisataan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Keparwisataan. Undang-undang pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan parwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa. Pasal 5 ayat (e) menjelaskan bahwa keparwisataaan harus diselenggarakan dengan prinsip memberdayakan masyarakat setempat.

Terkait dengan kebijakan ini juga, undang-undang no 10 tahun 2009 mengatur bahwa pembangunan keparwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan keparwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan keparwisataan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mendukung ini pemerintah membuat peraturan pemerintah RI nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan keparwisataan nasional 2010-2025. Pasal 2 menjelaskan bahwa pembangunan keparwisataan nasional meliputi: destinasi parwisata, pemasaran parwisata, industri parwisata dan kelembagaan parwisata.

Peraturan pemerintah ini juga memuat bahwa arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui keparwisataan meliputi, diantaranya adalah: pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan keparwisataan; perluasan akses pasar terhadap industri kecil dan menengah dan usaha parwisata skala



usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait mewujudkan wisata pesona untuk menciptakan iklim kondusif keparwisataan setempat.

Terait dengan ini, Pulau Rupat Utara merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 Tahun 2011. Pulau Rupat sebagai salah satu daerah di Kabupaten Bengkalis telah dimasukkan sebagai daerah yang menjadi prioritas rencana induk pariwisata nasional. Penetapan kebijakan ini juga didasarkan RTRW Provinsi Riau yang juga menjadi bagian kawasan strategis provinsi (KSO) yang disebut dengan kawasan Strategis Duri – Rupat – Rupat. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan pembanguna ekonomi di Provinsi Riau pada khususnya dan ekonomi regional umumnya.

Kedudukan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Rupat Utara menjadi pedoman arah kebijakan RTRW Kabupaten Bengkalis 2011 – 2031, dimana Tanjung Medang Rupat Utara menjadi kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Untuk mengembangkan kawasan ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya membangun sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kawasan ini. Kebijakan ini juga didukung dengan menetapkan pulau Rupat sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.

Arah kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis berbasis pada pariwisata budaya dan alam. Objek wisata di daerah Rupat Utara dikembangkan menjadi objek potensial karena memiliki pantai pasir putih sepanjang 17 kilometer di samping juga ada pantai Selat Baru. Daerah lain yang menjadi arah pembangunan di Kabupaten ini adalah pengembangan Sebungan Animal Park, taman kuliner dan rekreasi Andam Dewi, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dan wisata sejarah dan living museum rumah kapitan dan balai adat Melayu. Kabupaten Bengkalis sebagai daerah yang juga memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada dekat dengan Malaysia, menjadi menarik untuk dikembangkan.

Penetapan Pulau Rupat sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) berdasarkan PP 50/2011 tentang RIPPARNAS di Provinsi Riau. KSPN adalah kawasan



yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Rupat utara memiliki dua buah atraksi yang rutin dilaksanakan, yaitu: festival pantai rupat dan festival mandi safari.

Kabupaten Bengkalis memiliki visi untuk mewujudkan daerahnya sebagai negeri yang maju dan makmur. Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis membuat kebijakan dengan membagi beberapa kawasan untuk menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spasial, yakni:

1. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.
2. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
3. Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.
4. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

Sebagai fokus daerah wisata, pulau Rupat dan khususnya daerah Rupat Utara memiliki potensi wisata pantai yang menjanjikan. Selain itu, Kecamatan Rupat Utara membuat kebijakan dengan membuat visi daerahnya yang selaras dengan Kabupaten yaitu sejahtera dengan pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan rakyat secara terpadu dan merakyat dengan berlandaskan hati nurani dan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Misi Rupat Utara yaitu Membangun kualitas Sumber



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Daya Manusia baik jasmani maupun rohani. Meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan asli daerah. Meningkatkan produksi dan pasar rakyat. Membangun Sarana dan Prasarana. Membangun dengan berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki objek wisata pantai unggulan di kabupaten Bengkalis yaitu, pantai Selatbaru dan pelabuhan nelayan di Meskom.

Dinas pariwisata Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Riau juga membuat suatu perencanaan strategis untuk mengembangkan kawasan pariwisata Rupat Utara. Pemerintah kabupaten sebagai pemegang kendali utama daerah Rupat Utara sudah berupaya untuk mengembangkan pantai di Rupat Utara agar menjadi objek wisata andalan. Pantai Pesona yang terletak di Desa Teluk Rhu memiliki tidak hanya alam pantainya yang indah, namun budaya masyarakatnya yang atraktif sebagai objek wisata.

Kebijakan komunikasi dinas pariwisata untuk mengembangkan objek wisata tersebut juga telah membuat kegiatan komunikasi atau promosi bersamaan dengan penyusunan Rencana Induk pengembangan Objek wisata melalui pemanfaatan teknologi melalui handphone, internet, radio, surat kabar dan media massa lainnya. Kebijakan ini didukung dengan keberadaan website pariwisata untuk tujuan promosi di dalam kabupaten, luar daerah kabupaten hingga luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mendukung rencana induk yang telah disusun dan disosialisasikan. Dalam pelaksanaan program pembangunan ini, komunikasi pemerintah dalam mendukung kebijakan ini belum sepenuhnya mendapatkan dukungan masyarakat. Bahkan sering kali malah pemerintah cenderung menyalahkan sikap masyarakat yang kurang terlibat aktif dalam mengembangkan objek wisata yang dicangangkan pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekjen pariwisata Disparbudpora:

“Kelemahan dari program kita ini tidak berkembang dikarenakan juga kurang semangatnya masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata, hanya beberapa masyarakat desa saja yang bersemangat mendukung program kami ini. Padahal ini kan berguna untuk peningkatan ekonomi mereka”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dari sini dapat terlihat bahwa kesadaran wisata dan motivasi masyarakat dalam membantu mengembangkan potensi daerahnya untuk menjadi objek wisata masih terlihat kurang. Motivasi dan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mendorong dan mensukseskan program yang sudah dicangkangkan. Pemberian motivasi dan pelatihan bagi masyarakat memang sudah dilakukan oleh Dinbudparpora. Namun kegiatan pemberian pelatihan dan motivasi hanya fokus kepada pelaku pariwisata, itu pun sangat terbatas. Pemilihan khalayak kurang tepat sasaran, sehingga pesan tidak menyebar ke masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Bengkalis bahwa pemerintah mengadakan peningkatan sumber daya manusia terutama fokus untuk kelompok sadar wisata. Kegiatan pelatihan-pelatihan dan pemberian motivasi tidak dilakukan kepada masyarakat sebagai pihak yang mampu dilibatkan langsung.

Keseriusan pimpinan daerah dan komunikasinya sangat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah dan akan mendorong para pelaku pariwisata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Bengkalis:

“...harapannya kita sebenarnya Perlu adanya komitmen bersama dengan pemerintah di daerah khususnya Diperindag kemudian Dewan Perwakilan skala nasionalnya, Ibu PKK nya, dan bahkan juga butuh sampai level lurah atau desanya karena setiap desa sekarang kan sudah ada dana. Dan penggunaan dana itu saya katakan jangan ikut-ikutan latah memikirkan masalah infrastruktur juga, kadang-kadang kalau saya tidak salah saya, ada sebagian kecil saya lihat yang juga memikirkan masalah infrastruktur mereka tidak memikirkan bagaimana dana yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Hal diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan baik secara skala nasional hingga level kepala daerah, kecamatan, dan desa juga mempengaruhi keberhasilan pengembangan objek wisata dan masyarakatnya. Pemerintah dapat memberikan penanaman nilai dan tanggungjawab kepada para anggota pelaku pengembangan pariwisata. Sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Potensi yang menarik ini belum didukung dengan ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai. Padahal sarana ini menjadi komponen penting dalam pembangunan parwisata. Pemerintah memang sudah membangun sarana seperti gazebo, lapangan volly pantai, taman bermain anak, permainan air (banana boat dan jet sky), tempat ibadah, dan home stay atau penginapan. Namun prasarana penting malah sulit diakses terutama kamar mandi dan toilet yang masih sangat terbatas. Kalau dikelola dengan baik tentu akan meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD) dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun sayangnya hingga saat ini daerah wisata kurang dikelola, pengunjung masih jarang dan berpengaruh dari terabainya fasilitas yang sudah dibangun. Padahal kalau banyak pengunjung akan membantu masyarakat dalam menambah penghasilan mereka dengan membuka usaha pengelolaan penginapan, usaha kuliner atau tempat makan dan jasa lainnya.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara tidak langsung akan memerlukan tenaga kerja di berbagai bidang dan keahlian, seperti: pegawai biro perjalanan, juru masak, sopir, tukang parkir, dan lain sebagainya. Kunjungan wisatawan juga dapat memberikan kesempatan kerja secara tidak langsung seperti: pengerajin cinderamata, pembuat oleh-oleh, dan lain-lain.

Kebijakan pengembangan parwisata di Rupat Utara tidak didukung maksimal dengan kerja sama pihak lain. Padahal pengembangan objek wisata tidak lepas dari investor. Masalah yang dihadapi mengapa tidak banyak investor mau masuk mengelola, karena kurangnya fasilitas dan akses utama terutama jalan yang masih dan pelabuhan yang masih sangat terbatas. Pembangunan sarana parwisata yang baik dan tepat dapat menciptakan kenyamanan wisatawan sehingga betah tinggal lama. Semakin lama tinggal di daerah objek wisata maka secara otomatis semakin banyak uang yang dibelanjakan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting dan mendesak untuk mengembangkan objek wisata ini. Sarana transportasi baik jalan maupun kendaraan, sarana telekomunikasi dan jaringannya menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Pemberian pelayanan melalui sarana ini juga harus didukung dengan keramahan masyarakatnya. Semua ini dapat terbangun dengan kebijakan komunikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

yang konsisten dan berkelanjutan serta berkoordinasi antar elemen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang resmi terlembaga maupun yang tidak. Di sisi lain masyarakat penting untuk dilibatkan dan diberdayakan untuk bisa mandiri dalam mengembangkan destinasi wisata yang sudah ditentukan.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengatur, merancang dan membuat regulasi agar pelaksanaan pengembangan pariwisata dapat berjalan baik. Pengembangan destinasi wisata daerah sangat tergantung pada kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam hal ini, sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Bengkalis nomor 03 tahun 2012, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan usulan perintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Dinas ini juga menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021 visi Dinas yaitu “terwujudnya kabupaten Bengkalis sebagai daerah destinasi wisata yang berbudaya, berakhlak mulia, sehat dan sejahtera”. Salah satu visi keparwisataannya adalah mengembangkan keparwisataan untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang penting dalam pembangunan wisata dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam membina Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kesadaran itu sendiri tidak harus dimiliki masyarakat, akan tetapi dari pihak wisatawan. Kelestarian, keindahan, keamanan objek wisata tergantung pada bagaimana kesadaran masing-masing elemen



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

tersebut. Pantai Pesona sebagai objek utama bisa bersih dan asri jika masing-masing mereka dapat menjaga dan merawat secara bersama-sama. Pelestarian pantai, menjaga fasilitas yang tersedia dapat terbangun dengan komunikasi yang intens dan massif dari pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kesadaran wisata dapat terus dilakukan dengan memaksimalkan Pokdarwis yang ada di daerah objek wisata ini. Pokdarwis Tanjung Lapin sudah membuktikan prestasinya dengan mendapatkan peringkat ke dua di Provinsi Riau.

Kegiatan komunikasi parwisata dapat dikembangkan dari kesadaran wisata. Pengembangan bentuk komunikasi dan promosi wisata masih kurang. Meskipun komunikasi dalam bentuk sosialisasi sudah banyak dilakukan, namun pengelolaan belum maksimal. Berkembangnya teknologi semestinya dapat diikuti seperti pembuatan website khusus, aplikasi wisata terkait, akun media sosial khusus yang selalu mengingatkan akan branding objek wisata Rupat Utara. Berkembangnya media sosial facebook, instagram, twitter dan Youtube, ini semua dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi gratis. Objek wisata akan berkembang dengan dukungan pemasaran even-even atau festival yang gencar seperti even ritual mandi safar.

Perencanaan kebijakan pembangunan objek wisata dan komunikasi pemerintah belum memiliki sinergi yang tepat dalam membangun destinasi wisata yang ada. Proses penetapan dan pengalokasian sumberdaya komunikasi parwisata menjadi sangat penting dalam pembangunan destinasi wisata yang diinginkan terutama pantai Rupat dan Selat Baru sebagai unggulan Kabupaten Bengkalis. Sumber daya yang dimaksud tidak saja melibatkan saluran komunikasi atau media massa namun lebih spesifik lagi juga mencakup komunikasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan yang lain seperti masyarakat, pihak swasta, dan yang lainnya.

Pembangunan objek wisata juga merupakan pembangunan komunikasi dalam memasarkan objek tersebut. Pada dasarnya pembangunan objek wisata harus melibatkan aspek-aspek atau unsur-unsur yang membentuk kesatuan komunikasi, yaitu komunikator dan manusia yang terlibat di dalamnya, pesan-pesan yang



disebarkan, khalayak tujuan atau sasarannya, pilihan media dan saluran komunikasi yang digunakan dan efek atau perubahan yang diinginkan.

Dalam hal ini, perencanaan kebijakan pengembangan potensi Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis tidak didukung dengan kesiapan mengkomunikasikan dan mengenalkan program itu ke masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Padahal di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bengkalis seperti Desa Meskom, Muntai, dan beberapa desa lainnya memiliki karakteristik potensi pariwisata dengan kekhasan kearifan lokal daerah masing-masing. Pariwisata yang ada di Kabupaten Bengkalis merupakan wisata bahari sebagai unggulan dengan didukung wisata budaya, dan wisata rekreasi atau kuliner khas Bengkalis. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Pariwisata Disparbudpora Bengkalis:

“Untuk fokus atau unggulan Bengkalis ini sebenarnya ini memang wisata budaya (faktor budaya), kalau disini memang tidak akan mendapatkan kemewahan tapi nilai seni dan budaya yang memang menjadi unggulan yang sudah ada disini. Selain itu juga telah ada potensi wisata bahari disini seperti Pantai Selat Baru dan juga Pulau Rupat.”

Kabupaten Bengkalis memang tidak memiliki keunggulan yang terkait dengan kemewahan, seperti mal, tempat belanja atau industri hiburan lainnya. Namun Kabupaten Bengkalis menawarkan kesederhanaan yang terkandung dalam nilai-nilai tradisi masyarakat. Festival-festival budaya yang ditampilkan masyarakat yang rutin ditampilkan menunjukkan alam pikiran masyarakat yang tetap menjaga tradisi nenek moyang mereka, seperti makanan yang dimakan, permainan, kesenian, hingga perlombaan yang diadakan. Dimana fokus pengembangan wisatanya adalah keindahan pantai dan keramah-tamahan masyarakatnya. Hal senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen Pariwisata Disparbudpora Bengkalis:

“Dari berbagai potensi wisata yang ada itu, yang menjadi titik fokus pemerintah untuk dikembangkan pembenahan situs-situs yang ada dan pengembangan pariwisata pantai yang terfokus pada pantai rupat & pantai Selatbaru. dengan beragam budaya termasuk keramahan tamahannya,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kemudian pemerintah dengan Pemda ingin membangun desa wisata budaya melalui dinbudparpora”

Program Pengembangan Potensi objek wisata di Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk menggerakkan, memakmurkan, meningkatkan kesejahteraan perekonomian serta mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran masyarakat desa di Kabupaten Bengkalis. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu adanya sebuah perencanaan kebijakan dan komunikasi yang baik baik dan tepat. Perencanaan yang tepat dibuat tanpa didukung komunikasi yang tepat tentu tidak akan berhasil. Perencanaan kebijakan dan komunikasi program pembangunan parwisatanya tentu harus saling bersinergi dan saling mendukung kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemerintahan adalah minimnya komunikasi yang mendukung terhadap kebijakan pembangunan yang sudah dibuat atau ditetapkan.

Pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh merupakan bagian komunikasi yang digunakan untuk merealisasikan rencana strategis suatu organisasi pemerintahan baik tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Perencanaan pengembangan pariwisata/desa wisata yang didanangkan oleh pemerintah mestilah diimplementasikan dengan mengkomunikasikan kepada masyarakat, dan stake holder lainnya untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Selain itu program komunikasi pemerintah juga tidak hanya dalam pelaksanaan, namun harus sudah dilakukan dalam tahapan analisis potensi pariwisata, pelaksanaan hingga pada tahapan evaluasi keberhasilan program tersebut.

Dalam proses pengembangan objek wisata, setidaknya pemerintah sudah melibatkan masyarakat secara aktif untuk membangun desa sebagai destinasi wisata. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah secara tidak langsung memberdayakan dan membangun budaya masyarakat. Jadi pembangunan pariwisata yang dicangkang akan melibatkan dan memberdayakan masyarakat yang ada. Pembangunan objek wisata pada dasarnya bersinergi dengan pengembangan desa wisata. Pembangunan desa wisata tidak akan jalan tanpa memberdayakan masyarakat dimana objek wisata berada. Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab terlebih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dahulu melakukan kajian desa mana yang layak untuk dikembangkan menjadi desa wisata dengan melihat potensi yang ada lalu dibuat program untuk perkembangannya lalu disosialisasikan dengan masyarakat sekitarnya dan dituangkan dalam program kerja Disparbudpora (pemerintah). Kegiatan kajian tersebut kemudian menghasilkan beberapa hasil yang bentuknya ditemukan beberapa potensi pariwisata yang masih kurang dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Disparbudpora:

“kriteria yang harus dimiliki sebuah desa sehingga bisa dikembangkan menjadi desa wisata di Kabupaten Bengkalis ini adalah kami analisis apakah mempunyai potensi pariwisata dan infrastruktur yang memadai. Dari kegiatan analisis potensi ini dapat ditemukan potensi beberapa pariwisata pedesaan yang masih belum dimanfaatkan”

Dalam tahapan ini pemerintah sudah melakukan kajian dengan tepat untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata untuk dikembangkan. Upaya tersebut dilakukan supaya potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah wisata tersebut dapat terealisasi. Hal ini dilakukan dengan tahapan yang sudah ditentukan yaitu dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata. Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan akan dikelola oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis memiliki kepengurusan yang dibentuk untuk melakukan pengembangan potensi daerah atau Desa Wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pokdarwis merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata daerah dalam rangka peningkatan peran masyarakat untuk kampanye sadar wisata. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas pariwisata atau Dinbuparpora:

“...Untuk beberapa Desa sudah ada yang namanya itu Pokdarwis yang mengurus pariwisata, seperti di Pulau Rupat yang aktif, Kalau di Selat Baru sini memang belum, sudah terpikir untuk membuat mereka lebih aktif yang di Selat Baru. Dan di beberapa daerah sudah kita coba, di Rupat, kelompok sadar wisatanya nomor 2 di Riau. Homestay sudah lumayan banyak dan pengelolaannya oleh masyarakat langsung.

Upaya Pembangunan daerah wisata dilakukan dengan kegiatan yang telah dilakukan yaitu dengan cara perencanaan yang dituangkan dalam penganggaran dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

melalui kegiatan anggaran APBD. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dengan melakukan koordinasi dan kerjasama baik dengan sesama instansi pemerintah (dinas terkait) dan berusaha bersinergi dengan pihak swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan dan juga dalam melakukan promosi kegiatan wisata maupun objek wisata itu sendiri. Terkait dengan pengelolaan pengembangan objek wisata ini, sekretaris Dinas Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pelaksanaannya yakni terkait pembuatan program kerja, membuat kegiatan anggaran APBD, dan melakukan promosi investasi.

Dalam lingkup manajemen pengembangan daerah wisata ini, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat penting untuk menunjang agar pengembangan pariwisata dapat terlaksana dengan baik. Disbudparpora telah membuat perencanaan kegiatan dan kebijakan program dengan mengalokasikan dana pelatihan-pelatihan, pembinaan dan studi banding sebagai salah satu bentuk dari upaya pengembangan pariwisata di Desa Wisata Bengkalis. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekjen Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Bengkalis,

“kita memang pernah ikut serta dengan mengirim beberapa kegiatan ke Pekanbaru, ada perwakilan 1-2 orang untuk ke Bangka Belitung dan pernah juga Lombok kita juga mengalokasikan dana untuk meningkatkan SDMnya kayak untuk pelatihan-pelatihan, studi banding serta terus melakukan pemberian motivasi kepada masyarakat...”

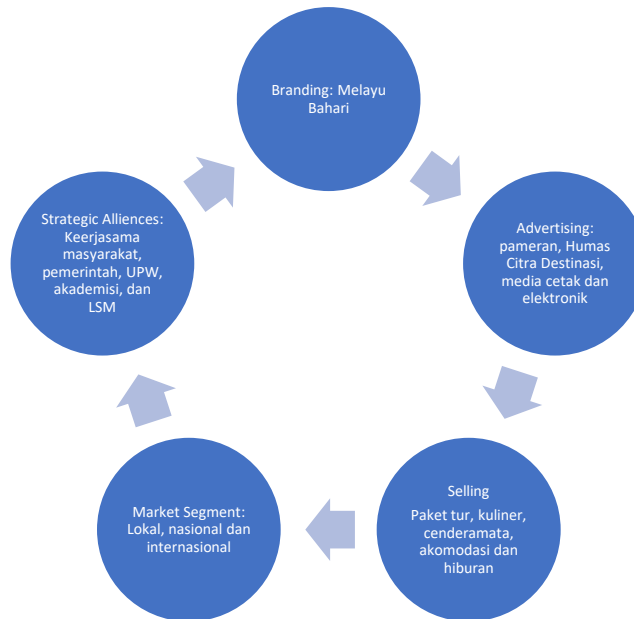
Pemerintah telah merancang dan membuat kebijakan dengan upaya untuk membranding destinasi wisata yaitu “melayu bahari”. Pelaksanaan kegiatan komunikasi pariwisatanya yaitu dengan mengalokasikan dana untuk pameran, pelatihan, pembinaan kerjasama, pemasaran atau promosi wisata dan studi banding sebagai salah satu upaya mengembangkan pariwisata di Bengkalis. Konsep ini sudah dimiliki oleh pemerintah kabupaten Bengkalis, namun dalam praktik pelaksanaannya masih banyak tidak terintegrasi dan terlaksana dengan maksimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gambar 5.2:
Strategi Komunikasi Parwisata Bengkalis



Proses perencanaan pembangunan program wisata dan kegiatan komunikasi keparwisatahan yang dilakukan oleh pemerintah Bengkalis pertama yaitu melakukan analisis potensi daerah wisata, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Dokumen Terpadu Pemetaan Potensi Daerah Wisata yang berisi program kerja pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis. Upaya pengembangan objek wisata ini kemudian dilakukan untuk menunjang kegiatan agar terkelola dengan baik dengan membuat penganggaran dana dalam kegiatan anggaran APBD dan membuat kepanitiaan untuk mengelola yaitu Pokdarwis serta melakukan promosi investasi. Kelompok ini bersinergi dengan penyuluh yang ditugaskan oleh dinas di setiap kecamatan yang ada di Bengkalis. Kendala yang dialami selama proses perencanaan yaitu kurangnya dana untuk membangun sarana dan prasarana pengembangan pariwisata.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.1.2 Proses Komunikasi Parwisata dalam Pembangunan Destinasi Wisata di Kabupaten Bengkalis

Proses komunikasi parwisata dalam pengembangan objek wisata sebagai destinasi unggulan untuk dikunjungi memang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Kegiatan komunikasi masih bersifat sporadis dan tidak terkelola dengan baik. Dalam hal ini belum ada koordinasi dan belum dilakukan pembagian dan pemberian tugas, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan kepada setiap individu dan kelompok untuk mensukseskan pembangunan destinasi parwisata yang dicangkakan. Bahkan pemerintah masih terkesan hanya menerapkan rencana tanpa didukung dengan implementasi yang konsisten untuk mendapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Proses kegiatan komunikasi yang dilakukan tidak hanya terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan destinasi wisata, tapi dapat dilakukan pada tahapan perencanaan kebijakan hingga evaluasi kegiatan itu sendiridilakukan. Pelaksanaan kegiatan program dan kebijakan pembangunan parwisata di Kabupaten Bengkalis masih belum bersinergi antar pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak masyarakat, hitel atau biro travel. Bahkan antar sesama dinas pemerintah masih belum bersinergi dengan baik terutama dalam pembangunan infrastruktur pendukung obejek wisata yang sudah ditetapkan. Bahkan terkesan pemerintah hanya membangun infrastruktur asal-asalan tanpa didukung peenanaan dan konsep yang matang. Banyak objek wisata yang tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai, bahkan prioritas yang dibangun tidak menjadi hal yang utama seperti jalan, toilet dan air bersih seperti di Pantai Selat baru dan Pantai Rupat Utara.

Aparat pemerintah memang sudah mengatur dan membagi tugas di antara para anggota organisasiDispadbudpora Kabupaten Bengkalis agar tujuan dari pengembangan potensiWisata yang ada di Kabupaten Bengkalis dapatdicapai sesuaiyangtelah ditetapkan. Namun dalam pengembangan destinasi wisata atau Desa Wisata, pemerintah sering kali membiarkan aset-aset tanpa melibatkan masyarakat atau mengkomunikasikan kepada pengunjung untuk menjaga objek wisata yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dikembangkan. Dinas pariwisata memang mempunyai wewenang untuk memberi pengarahan, fasilitator, dan pembinaan di kepengurusan kelompok sadar wisata sehingga secara teknis pengelola pengembangan sepenuhnya lebih ke Pokdarwis, tapi Pokdarwis yang tidak aktif menjadikan objek wisata menjadi tidak terkelola dengan baik. Hal ini membutuhkan komunikasi yang intensif antar pihak-pihak terkait terutama pemerintah dan masyarakat, terutama Pokdarwis melalui pembinaan yang rutin. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekjen Kepala Bidang Pariwisata Disparbudpora:

“sebenarnya Iya kita memang sebagai pembina dari proses pengembangan itu, dan seberapa rutin kita punya UPT sana, bahkan kita sudah memiliki UPT per kecamatan, juga ada UPT olahraga, kebudayaan dll. Itulah UPT sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk dapat langsung membina masyarakat itu. Masyarakat Bengkalis sudah mulai meningkat kesadaran pariwisatanya. Contohnya itu Wisata Desa Muntai yang memang dikelola oleh masyarakat yang mengelolanya mandiri.

Proses koordinasi pemerintah sebagai bentuk komunikasi juga dilakukan mengingat ada beberapa pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi Wisata di Kabupaten Bengkalis meliputi Pemerintah kabupaten Bengkalis, Disbudparpora, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata). Dalam melakukan koordinasi, komunikasi antar sektor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan objek wisata yang dikembangkan. Komunikasi pihak pelaksana dalam pengembangan objek wisata sangat diperlukan untuk mensin kronisasikan tujuan yang diinginkan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan kebijakan bidang pariwisata ini.

Komunikasi dalam pembangunan objek atau destinasi pariwisata yang dilakukan dalam sistem pemerintahan baik yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi vertikal terjadi pada jajaran struktural dengan adanya laporan dan perintah dari atasan ke bawahan. Komunikasi horizontal dapat berbentuk interaksi dan pertukaran informasi antar anggota yang setara



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

jabatannya. Bentuk komunikasi horizontal dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pihak yang terkait antar sesama dinas atau lembaga yang terkait. Meskipun demikian bentuk komunikasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, komunikasi harus melibatkan semua element masyarakat, swasta dan bahkan wisatawan yang ada. Sayangnya komunikasi tidak terstruktur dalam kegiatannya, sehingga mengakibatkan komunikasi pariwisata dan tujuan pengembangan objek wisata tidak maksimal. Padahal koordinasi antar sektor atau lintas instansi sangat besar pengaruhnya dalam kemajuan pengembangan program wisata. Terkait dengan pengkoordinasian komunikasi sekretaris Disparbudpora Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa:

“orang yang bertugas dalam menyampaikan pesan-pesan terkait dengan pelaksanaan program tersebut meliputi pimpinan daerah, Intansi pemerintah, Investor dan Pemuka masyarkat (Tokoh masyarakat). komunikator tersebut menyampaikan pesan-pesan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan cara melakukan rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan para investor asosiasi pariwisata dan tokoh masyarakat”.

Pemegang kendali kebijakan dan komunikasi dalam pengembangan wisata ada pada Disparbudpora Kabupaten Bengkalis dimana bidang utama yang melaksanakannya yaitu bidang pariwisata. Namun demikian dinas ini memiliki kewenangan yang seluruhnya dipertanggungjawabkan ke Bupati Bengkalis. Kewenangan komunikasi dan pengembangan pariwisata ini tidak dapat diandalkan pada pemerintah, karena dalam kenyataannya masyarakat lebih aktif melalui Pokdarwis dan masyarakat secara mandiri. Pemerintah Desa dan pihak teknis Disparbudpora adalah Pokdarwis yang bertanggung jawab secara bersama dalam membangun objek wisata. Kegiatan komunikasi pariwisata masih kurang gencar dilakukan dan pelaksanaan masih kurang dalam hal pengelolaannya. Kendala komunikasi yang dihadapi adalah pembagian wewenang dan tugas masih belum jelas antar dinas-dinas yang ada, seperti pembinaan terhadap kelompok masyarakat dan usaha yang terkait dengan pariwisata. Hal ini juga masih kurangnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari pemerintah maupun masyarakatnya. Hal ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sebagaimana yang disampaikan Oleh Sekjen Disparbudpora,

“Kami merasa bahwa SDM pariwisata kami untuk mengembangkan potensi wisata yang ada disini memang sangat kurang. Kami inginnya bukan di Pekanbaru dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan, tapi ddilaksanakan disini. Saya selama 2 tahun disini memang belum ada pelatihan seperti itu. Dan kita memang kurangnya memberikan pelatihan. Pelatihan praktis yang terkait kegiatan dihotel misalnya seperti kebersihan dan lain sebagainya memang perlu ditingkatkan.”

Berkaitan dengan ini, keberadaan sumber daya manusia pengembangan objek wisata baik pemerintah maupun masyarakat masih kurang. Pemberian pelatihan baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan masih sangat kurang untuk dikuasai oleh mereka yang terlibat dalam keparwisataan. Tenaga yang diperbantukan di UPT dan di desa atau daerah objek wisata masih sangat minim dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga akan sangat sulit untuk mempercepat pembangunan destinasi wisata. Hal ini juga disampaikan oleh Bidang Perencanaan Pariwisata Disparbudpora:

“Kita memang ada tenaga honorer dan pegawai yang ditempatkan di UPT, tapi memang sangat kurang jika dibandingkan dengan daerah yang lain. Kekurangan kita adalah belum adanya tersentuh oleh perusahaan travel untuk menuju daerah-daerah wisata yang ada.”

Pihak Disparbudpora memandang bahwa kegiatan pembinaan dan kontrol kegiatan pariwisata masih kurang maksimal. Meskipun ada tenaga honorer serng kali keberadaannya belum banyak membantu. Kalau ada penambahan sering kali keahlian yang dimiliki tidak tepat dan pelaksanaannya tidak dikontrol secara maksimal. Lemahnya pengawasan dan kontrol dalam komunikasi yang terkait pengembangan potensi Wisata di Kabupaten Bengkalis dapat terlihat dari kurangnya antusias masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pembangunan objek wisata dan komunikasi yang mendukung pariwisata yang dilakukan umumnya diadakan masih bersifat formal. Kegiatan dilakukan dengan adanya agenda pertemuan dalam acara-acara pelatihan maupun pertemuan yang membahas sosialisasi mengenai pengembangan potensi Desa Wisata di Kabuapten



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bengkalis. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Disparbudpora,

“Sejauh ini pemerintah berusaha melakukan pembinaan desa wisata yang ada dengan melibatkan peran masyarakat di sekitarnya misalnya dengan membentuk kelompok sadar wisata dan pembinaan ekonomi kreatif. Dan mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi yang ada.”

Berdasarkan hal ini, proses komunikasi dalam pembangunan keparwisataan di Kabupaten Bengkalis cenderung dilakukan searah, bukan timbal balik. Komunikasi bersifat *top down* bukan *bottom up*. Banyak kegiatan komunikasi yang terkait dengan sadar wisata lebih banyak didominasi oleh peran pemerintah, tanpa banyak melibatkan masyarakat secara aktif. Komunikasi pemerintah sangat formalistik dan hanya berdasarkan pada aturan-aturan yang ada dan disesuaikan pada anggaran dan kegiatan yang ditetapkan. Di sisi lain kelompok sadar wisata yang mengembangkan dan menyebarkan pesan tanpa dukungan pemerintah secara maksimal sangat sedikit yaitu Pokdarwis tTnjung lapin, sementara yang lain tidak berfungsi maksimal.

Komunikasi antar pelaksana pengembangan objek atau destinasi pariwisata seperti di Pulau Rupat dan di Selat baru Kabupaten Bengkalis kurang intens dilakukan. Hal ini diakibatkan oleh hubungan antar lembaga dan sektor masih bersifat formal karena terikat pada birokrasi dan garis struktural pada organisasi pemerintahan yang terlalu kaku. Koordinasi dan komunikasi yang dapat dilihat dari tingkat atas di pemerintah kabupaten hingga di tingkat desa, pertanggungjawaban tugas masing-masing hanya mengandalkan pada anggaran pemerintah saja. Hal inilah yang menyebabkan objek wisata yang dicangangkan tidak berkembang, pihak swasta dan masyarakat masih kurang dilibatkan.

Bentuk kegiatan komunikasi pariwisata yang dilakukan setidaknya sudah melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Pelibatan ini akan memberi nilai tambah bagi kemajuan objek wisata dan dalam membantu melakukan promosi. Memberi pelatihan-pelatihan tidak cukup, tapi keadaan Pokdarwis dan para stakeholder yang terlibat harus ikut sertakan dalam memasarkan dan membangun destinasi wisata secara maksimal. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pariwisata Disparbudpora Kabupaten



Bengkalis,

“peran kita memang dalam bentuk event/pameran kita bawa ke Provinsi, disana potensi wisata dan budayanya kita kenalkan. Tapi memang dalam penggarapannya yang kurang. Program kitakan sudah ada, Cuma ya begitu butuh banyak dibantu oleh berbagai pihak, Disperindag, dan sekarang remaja yang ada disini juga sudah mulai sadar, membuat film, membuat website dan lainnya. Para pengusaha yang ada disini belum ada menyentuh, travel rata-rata masih sebatas umroh saja.

Potensi objek wisata pantai sebagai unggulan daerah Kabupaten Bengkalis masih kurang tergali secara maksimal, hal ini disebabkan promosi meskipun ada tidak ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang kurang. Dukungan pembangunan sarana penunjang yang masih kurang membuat objek wisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi kurang menarik. Promosi pemerintah meski kurang, tetap dengan keberadaan media sosial saat sekarang ini pesan objek wisata mudah beredar luas. Berbagai kasus banyak ditemukan, banyak masyarakat di luar daerah kabupaten Bengkalis yang ingin ke pantai Rupat, melihat kondisi jalan yang rusak membuat masyarakat tersebut memutar balik jalan untuk kembali ke daerah lain untuk dijadikan tujuan wisata.

Berkaitn dengan ini, komunikasi pemasaran dan promosi objek wisata Bengkalis menjadi sangat penting untuk dikembangkan dan harus sejalan dengan pembangunan sarana utama atau penunjangnya objek wisata terkait. Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis memiliki keunikan untuk dikembangkan menjadi pulau objek wisata, namanya sudah memiliki brand sebagai destinasi untuk dikunjungi wisatawan, namun sayangnya yang sering dikeluhkan wisatawan adalah sarana transportasi yang masih sulit untuk menuju lokasi wisata.

Jadi dalam hal ini pembangunan parwisata tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada dinas parwisata, melainkan harus melibatkkan semua dinas terkait dan melibatkan semua komponen masyarakat dan pemangku kepentingan keparwisataan. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam upaya mengembangkan pariwisata adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melalui investor untuk menggarap menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Ada beberapa promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga seperti mempromosikan dengan cara membuat website, membantu mempromosikan dengan media online, membuat video profil mengundang biro wisata, pelaku wisata, dan mengundang media cetak.

Proses komunikasi dalam menunjang kebijakan pembangunan objek wisata di Kabupaten Bengkalis dikelola dalam bentuk komunikasi yang masih standar. Komunikasi yang dilakukan pemerintah hanya sebatas tugas rutin yang semestinya dikerjakan. Penganggaran, penambahan staf, mengusulkan program dan memberikan pelatihan rutin tanpa didukung dan dievaluasi keberlangsungan program pembangunan wisata secara berkelanjutan. Tidak banyak kreatifitas yang mampu dikembangkan untuk memajukan destinasi wisata yang ada, padahal pembangunan pariwisata membutuhkan kreatifitas. Pembangunan pariwisata adalah berbasis pada pembangunan budaya masyarakat.

Pemerintah terkesan masih kurang dalam menggali kearifan budaya dan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah Wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sebagaimana prioritas wisatanya yaitu pantai di Rupat Utara dan Selat Baru, aksi wisata berbasis budaya memang sudah dikembangkan seperti festival tahunan di kedua pantai tersebut dengan berbagai agenda yang ada. Namun festival ini belum mampu mendatangkan wisatawan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang Pariwisata, Dinas Budpar harus kreatif dalam mengembangkan objek wisata dengan bersinergi dengan program dan dinas yang lain. Komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah desa akan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Koordinasi ini juga dapat memantau keberhasilan program pembangunan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat.



1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Langkah-langkah Komunikasi Parwisata Pemberdayaan Masyarakat dan Destinasi Wisata

Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum memiliki program komunikasi dalam mengembangkan wisata secara terencana dan bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kebijakan parwisata terkait dengan ini memang sudah ditetapkan dalam UU Parwisata. Namun pengembangan destinasi wisata dalam praktiknya masih belum berkoordinasi dengan instansi atau dinas-dinas yang di kabupaten. Padahal pembangunan destinasi parwisata yang sudah ditetapkan baik UU maupun PP, namun pelaksanaannya masih belum nampak jelas realisasinya. Setidaknya pembangunan ini bisa berdampak bagi masyarakat dan dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah sudah menyadari peran penting masyarakat dalam pembangunan parwisata dengan membuat kebijakan yang terkait akan mendukung parwisata. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan parwisata belum mendapatkan pesan-pesan sehingga mereka mampu memahami dan memiliki kesadaran dalam mendukung pembangunan tersebut. Dalam pembangunan parwisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi sangat penting keberadaannya sebagaimana telah ditentukan dalam kebijakan pemerintah pusat.

Tidak semua objek wisata di Kabupaten Bengkalis memiliki Pokdarwis. Salah satu yang aktif dan berkembang hanya Pokdarwis di Kecamatan Rupat Utara. Pokdarwis Desa Tanjung Lapin Kecamatan rupat Utara mendapatkan peringkat kedua di tingkat Provinsi Riau. Pemerintah memiliki program dengan membuat kegiatan pelatihan kepada para pokdarwis dan pengelola yang mau bergerak maju untuk semangat mengembangkan pariwisata di Riau.

Ketua tim percepatan pengembangan pariwisata perdesaan dan perkotaan, Dr. Vitria Ariani, menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan Pokdarwis ini sangat baik dan bermanfaat bagi pengembangan pariwisata Riau, dimana daerah yang memiliki jargon "Riau the homeland of melayu". Riau saat ini sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan dalam bidang pariwisata. Hasil keluaran kegiatan ini, yaitu pemahaman para stakeholder pariwisata yang tidak hanya para pelaku tapi juga pemerintah dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

industri dalam hal pengelolaan destinasi pariwisata secara profesional dan terintegrasi dengan mengandalkan kolaborasi pentahelix, tak diragukan lagi jika pengelolaan tersebut dapat diimplementasikan maka Riau akan menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Menurut kegiatan pelatihan ini sangat menarik dan menyenangkan karena semangat para pokdarwis dan pengelola yang mau bergerak maju untuk semangat mengembangkan pariwisata di Riau.

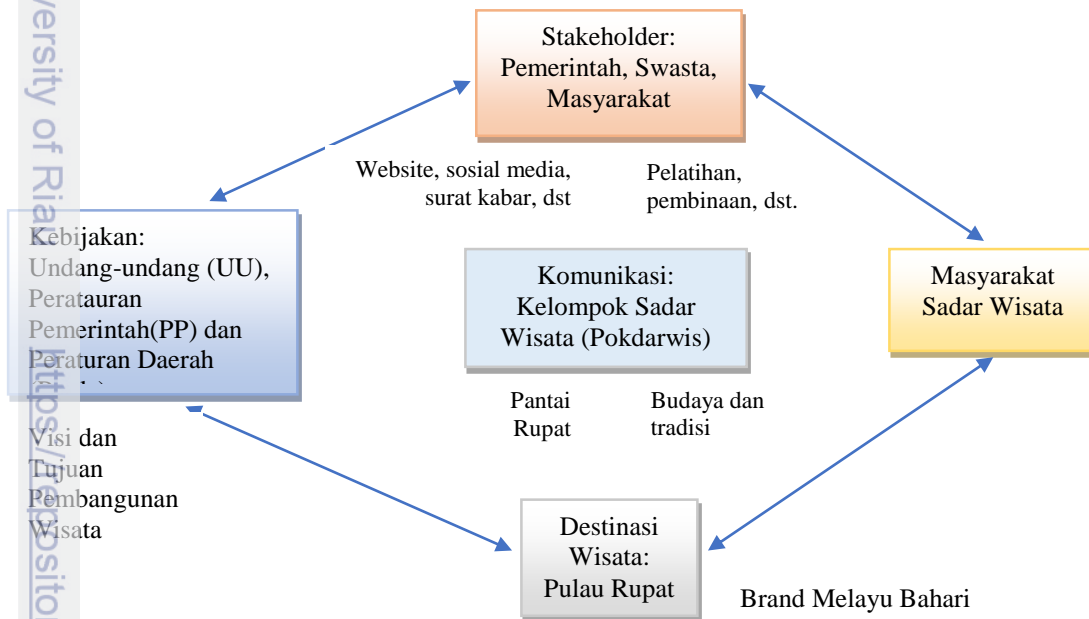
Pelatihan terhadap Pokdarwis diharapkan agar para peserta terus menggali potensi kearifan lokal di daerahnya masing-masing, dengan terus berinovasi dan berkreatifitas dalam mengembangkan atraksi dan aktivitas wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan dengan tetap berpihak pada kearifan budaya dan tata krama setempat. Pokdarwis berfungsi sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan objek wisata. Pokdarwis Desa Tanjung Lapin juga merupakan mitra pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan objek wisata di Rupert Utara. Kelompok ini diinisiasi pemerintah dengan dibuatkan surat keputusan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis. Berikut ini adalah peran kelompok sadar wisata dalam pengembangan objek pariwisata di Rupert Utara.

Kelompok ini menjadi penggerak dalam mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif bagi objek wisata di Rupert Utara. Kelompok ini dibentuk untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pantai Rupert sebagai objek wisata. Kelompok ini dibentuk sebagai bentuk amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no 11 PM17/PR.001/MKP/2010. Pokdarwis diberikan pembinaan langsung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, serta unsur lain pihak swasta dari kalangan industri pariwisata maupun asosiasi pariwisata. Pembinaan dilakukan melalui temu wicara, pendidikan dan pelatihan, lomba, jambore dan lain-lain. Selain itu ada juga pembinaan tidak langsung oleh melalui pemanfaatan media massa, melalui iklan di media cetak atau elektronik, media indoor maupun outdoor (misalnya: baliho, poster, banner, dan lain-lain) serta media berbasis internet seperti media sosial.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gambar 5.3:
Proses Komunikasi dalam Pembangunan Destinasi Wisata



Program pembangunan keparwisataan sangat penting melibatkan masyarakat sebagai unsur utama. Pelibatan ini memerlukan kreatifitas bentuk komunikasi yang digunakan, tidak hanya dalam mengembangkan objek wisata namun penting dalam memelihara destinasi wisatanya dalam membangun citra *brand destination*. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan (*empowerment*), agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta sekaligus menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai:

“Upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan”. (Renstra Dit. Pemberdayaan Masyarakat, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dari sini dapat ditegaskan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam kegiatan pembangunan pariwisata, yaitu masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan, harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam fungsinya sebagai subjek atau pelaku masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya. Masyarakat sebagai penerima manfaat, mengandung arti, bahwa masyarakat diharapkan dapat mengelola langsung dan mendapatkan nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sekretaris Dinas Pariwisata mengungkapkan bahwa,

“Kalau disini memang belum dikelola dengan baik pak, sudah terpikir di Selat Baru untuk diberdayakan. Dan di beberapa daerah sudah kita coba, di Rupat, kelompok sadar wisatanya nomer 2 di Riau. Mereka sudah mengembangkan bahkan sudah mengelola *homestay* sudah lumayan banyak dan pengelolaannya oleh masyarakat langsung”.

Meskipun masyarakat sudah mengelola beberapa hal melalui Pokdarwis untuk meningkatkan kesadaran wisata masyarakat, namun pantai belum banyak berkembang dengan baik untuk mendapatkan nilai tambah karena untuk akses masuk yang masih gratis dan fasilitas belum banyak tersedia. Dalam hal ini, Kepala desa Teluk Rhu mengemukakan bahwa,

“Pantai kita belum ada yang mengelola, jadi gratis untuk keluar masuk tanpa ada dipungut bayaran sehingga tidak ada uang masuk untuk mengelola objek wisata ini. Di sini, teluk Rhu, banyak jalan bahkan semua rumah ada di pinggir pantai bisa dilewati untuk turun ke pantai untuk bisa menuju pantai Pesona. Kalau tanjung punak Cuma satu jalan untuk ke pantai tanjung lapin”(wawancara, 26 juli 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Hal inilah yang mendasari terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Tanjung Lapin di Kecamatan Rupert Utara. Pokdarwis memiliki peranan penting dalam membangun iklim atau lingkungan yang kondusif dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang dikembangkan secara konsisten di kalangan masyarakat yang tinggal di pantai di Rupert Utara sebagai destinasi pariwisata. Kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun destinasi wisata dapat dilihat dari dua hal, yaitu: masyarakat menyadari peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah yang baik bagi tamu atau wisatawan dan masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata.

Sapta Pesona adalah tujuh unsur yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Adapun tujuh unsur Sapta Pesona yang dimaksud di atas adalah : 1) Aman 2) Tertib 3) Bersih 4) Sejuk 5) Indah 6) Ramah 7) Kenangan. Dengan mewujudkan ketujuh unsur tersebut Pantai Rupert Utara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ketua Pokdarwis Tanjung Lapin yang mengatakan,

“Peran Pokdarwis adalah untuk menyadarkan masyarakat tentang manfaat wisata itu sendiri. Manfaatnya itu sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang rendah, karena sesuai perundang-undangan pariwisata bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Sementara tugas Pokdarwis menyadarkan masyarakat tentang pentingnya wisata, karena pariwisata itu dibangun kan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tugasnya menyadarkan dan menyadarkan masyarakat tentang manfaat pariwisata. Pemerintah sebagai fasilitator dan kami sebagai penggerak” (wawancara, 26 Juli 2018).

Kesadaran wisata masyarakat menjadi sangat penting untuk diciptakan di kecamatan Rupert Utara, karena dukungan masyarakat berpengaruh dalam



pengembangan destinasi wisata pantai Rupert. Brand destinasi wisata Rupert tidak akan terbangun tanpa ada upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten dan aktif dalam mengembangkan sadar wisata dan sapta pesona terutama bagi para pemangku kepentingan. Terwujudnya ketujuh unsur Sapta Pesona dalam pengembangan kepariwisataan di daerah akan bermuara pada:

1. Meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke destinasi
2. Tumbuhnya iklim usaha kepariwisataan yang prospektif
3. Meningkatnya lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan, serta dampak ekonomi multi ganda pariwisata bagi masyarakat.

Sadar Wisata dan Sapta Pesona sebagai unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud secara otomatis. Dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya.

Langkah-langkah komunikasi untuk pembangunan pariwisata Rupert Utarabisa dilakukan dengan membuat program komunikasi yang tepat. Berdasarkan temuan proses komunikasi pariwisata yang sudah dijelaskan sebelumnya, langkah-langkah yang ada masih terlihat jauh dari idealnya. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya perencanaan program komunikasi baik dari sisi penetapan langkah-langkah komunikasi maupun dalam koordinasi pengembangan komunikasi dan pemasaran objek wisata pantai di Kabupaten Bengkalis sebagai destinasi wisata. Komunikasi dalam menunjang pembangunan pantai Rupert Utara misalnya bisa menggunakan tahapan perencanaan komunikasi dengan tahapan berikut.

1. Menganalisis Masalah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kecamatan Rupert utara memiliki wilayah yang strategis berbatasan dengan Selat Malaka dan merupakan jalur kapal internasional. Selain itu Rupert Utara memiliki potensi pariwisata yang baik seperti pantai yang indah dengan pasirnya yang putih memiliki garis pantai sepanjang 17 km dan keadaan masyarakat Rupert utara yang masih kental dengan adat istiadatnya. Namun pengembangan objek pariwisata belum dilakukan secara optimal seperti belum banyaknya pengunjung yang datang untuk berwisata di Rupert Utara. Penyebab masalah utamanya adalah pesan komunikasi dan promosimasih sangat kurang, infrastruktur penunjang seperti jalan menuju objek wisata yang masih buruk, penginapan yang belum terkelola dengan baik, restoran dan sarana transportasi yang tidak memadai.

Bila dilihat dari aspek sosial budaya Rupert Utara memiliki potensi budaya yang sangat menarik dimana terdapat bermacam suku di antaranya melayu, dan masuknya jawa, batak, penduduk asli rupert yakni suku akit, artinya keragaman etnik di Rupert Utara menandakan suatu bukti ada nilai-nilai kebudayaan yang patut untuk dipertahankan dan diperkenalkan ke masyarakat luar sebagai suatu potensi kebudayaan yang beranekaragam. Bila dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan apabila ditata dan dikembangkan potensi-potensi yang ada di Rupert Utara baik dari wisata alam maupun wisata budaya bukan hal yang mustahil untuk mengundang investor menanamkan sahamnya di Kecamatan Rupert Utara, namun kebijakan pemerintah yang belum jelas malah menghambat investasi. Tidak adanya investor asing maupun lokal yang berminat karena tidak diberikangambaran infrastruktur apa yang akan dibangun pemerintah. Sehingga sangat beralasan bila pendapatan asli daerah dari Rupert Utara belum ada, padahal memiliki aset yang potensial untuk dikembangkan.

Sampai sekarang ini Rupert Utara belum memiliki RIPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) sendiri. Pedoman atau pegangan yang dipakai oleh Disparbud Kabupaten Bengkalis masih mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021. Adapun kebijakan yang telah terealisasi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bengkalis Untuk Kecamatan Rupert Utara menurut RPJMD adalah sektor perkebunan, sektor peternakan,



perikanan dan kelautan. Untuk pengembangan pariwisata, Pulau Rupat termasuk dalam KSPN (Kawasan Strategi Pariwisata Nasional).

2. Menganalisis Khalayak

Siapa pun punya kesempatan untuk mengembangkan objek wisata. Khalayak sasaran menjadi sangat penting untuk ditentukan dalam pembuatan program komunikasi pariwisata. Komunikasi pembangunan pariwisata di Bengkalis dengan kasus pantai di Rupat Utara, tentu sasaran khalayak yang penting untuk dibangun kesadarannya adalah dari sisi pemerintahnya terlebih dahulu, baru kemudian jajaran yang dibawahnya, baru kemudian stake holder yang terlibat; baik masyarakat, pengusaha, pedagang, dan lain-lain.

Sasaran khalayak harus diprioritaskan pada pemerintah karena mereka adalah pembuat kebijakan dan pemegang wewenang. Mentalitas aparat pemerintah harus memahami secara komprehensif untuk membangun dan mengembangkan objek pariwisata, karena mereka menjadi teladan yang ditiru oleh masyarakatnya. Selain itu, khalayak potensial lain yang diharapkan menjadi penyebar pesan yang dan menciptakan brand destination adalah, Masyarakat Rupat Utara, biro travel, pengusaha, dan wisatawan baik lokal maupun luar. Kesan yang baik dari wisatawan menjadi makna tersendiri ketika mereka menceritakan pengalamannya kepada yang lain (*word of mouth*).

3. Merumuskan Tujuan

Tujuan pembangunan pariwisata termasuk di dalamnya tujuan komunikasinya harus bersinergi dengan visi dan misi pemerintahan tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Tujuan pembangunan bisa menjadi wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Tapi tujuan komunikasi program pembangunan pariwisata yang dikembangkan akan terbenam di benak khalayak. Kesadaran wisata masyarakat akan terapai dengan baik bila rumusan tujuan program komunikasi dibuat dengan baik.

Setidaknya program komunikasi yang dibuat untuk mengembangkan objek wisata dapat dan telah memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih sadar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

wisata dan ekonomi masyarakat berubah menjadi lebih baik dengan skala jangkauan sasaran khalayak yang tepat dan waktu yang sesuai. Tujuan program komunikasi setidaknya dapat mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mendukung program pengembangan objek wisata yang dicangkangkan. Tujuan komunikasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku aparat pemerintah, masyarakat, pedagang, dan stake holder lain. Hal ini dapat terlihat pada kepedulian dan sadar wisatanya yang masih kurang.

4. Memilih Media dan Saluran Komunikasi

Banyak pilihan saluran dan media komunikasi yang digunakan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis. Namun keberadaan saluran komunikasi antar pribadi, kelompok dan organisasi termasuk penggunaan media massa masih belum maksimal digunakan. Saluran komunikasi tatap muka melalui pemerintah atau pelatihan kepada masyarakat terlibat pembangunan pariwisata masih kurang. Keberadaan Pokdarwis sebagai saluran komunikasi kelompok dapat digunakan secara tepat, namun hanya sedikit Pokdarwis yang aktif, itu pun tidak terlalu maksimal. Disamping menggunakan saluran komunikasi tatap muka baik pelatihan dan pengarahan, penggunaan media berbasis internet seperti media sosial sangat tepat saat ini. Penggunaan media berbasis internet lebih murah dan mudah serta mendapatkan respon yang cepat dibanding dengan penggunaan media yang lainnya yang mahal dan lebih lambat.

Salah satu strategi komunikasi pemilihan saluran komunikasi dan media yang harus dilakukan dalam promosi suatu objek wisata saat ini adalah dengan media sosial karena media ini saat populer digunakan. Di samping karena murah dan cepat, media sosial mampu menjangkau sasaran khalayak yang luas dan memberi kesan yang sangat mempengaruhi pengguna dan penikmatnya. Semua kalangan menggunakan media sosial dan bahkan sangat membutuhkan media sosial dalam kegiatannya sehari-hari. Melalui media sosial, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk promosi objek wisata yang dikembangkan seperti halnya keberadaan objek wisata di Rupat Utara,



seperti: instagram, facebook, website, twitter, youtube dan media sosial lainnya. Selidaknya pemerintah sebagai pemegang kewenangan utama harus memiliki banyak akun media sosial yang aktif sehigga pesannya dapat disebar luas oleh masyarakat.

Pemilihan media komunikasi untuk pemasaran dan promosi memang belum menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata di Bengkalis khususnya di Kecamatan Rupat Utara. Kegiatan promosi dilakukan melalui media internet dengan Website www.pantairupatutara.com. Kalau mau kraetif, promosi dapat dilakukan dengan memanfaatkan masyarakat dan wisatawan itu sendiri melalui pengalaman-pengalaman yang mengesankan yang dialami selama berkunjung ke objek wisata yang dikunjungi.

5. Mengembangkan Pesan

Pengembangan destinasi parwisata di Kabupaten Bengkalis sangat kurang, walaupun ada masih banyak dikelola dan disebarkan oleh masyarakat langsung maupun pengalaman wisatawan. Objek wisata yang dikemas baik pun belum tentu mendapat sambutan baik bila pesan-pesan belum diterima luas oleh khalayak. Pesan komunikasi yang baik harus ada ditemukan dimana-mana, ada di pantai, di fasilitas, di masyarakat dan tentunya pada media yang digunakan dan disebarluaskan. Pemberian tagline dan hashtag menjadi sangat penting untuk promsi destinasi wisata di Bengkalis. Promosi untuk pantai Rupat Utara adalah salah satu hal yang mampu mengeksplor wisata Rupat Utara lebih jauh lagi. Misalnya, dengan tagline “Pesona Rupat Utara” dan hashtag, #PesonaRupatUtara. Pesan tersebut kalau mendapat sambutan masyarakat luas tentu akan membuat khalayak ingin berkunjung ke tempat objek wisata tersebut. Namun jika kegiatan promosi ini tidak disambut oleh pesan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung dan memadai, membuat pesan itu menjadi terhambat. Pesan ini akan menyebar karena pengalaman buruk wisatawan menyebar ke khalayak lain karena pengalaman yang dialaminya itu.

Oleh karena itu, adanyamedia komunikasi dan saluran yang baik dalam mengembangkan objek wisata tanpa dukungan fasilitas di lapangan yang cocok dan memuaskan. Bentuk komunikasi pemasaran atau promosi objek di tagline atau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

hashtag itu bisa digunakan disemua media social akan hanya menjadi sia-sia belaka. Tapi bila setiap foto, vlog, atau tweet yang berkaitan dengan Rupat Utara selalu memakai tagline atau hashtag yang sama memuat kesan yang baik dari pengunjung, secara tidak langsung akan mengembangkan objek wisata itu sendiri. Karena objek akan berbicara langsung melalui pengalaman wisatawan yang berkunjung.

6. Perencanaan manajemen sumberdaya komunikasi

Pengelolaan komunikasi yang paling efektif adalah dengan manajemen yang tepat. Manajemen sumberdaya pendukung komunikasi pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata seperti Pulau Rupat harus dimulai dari pemerintah. Komunikasi atau informasi terkait kegiatan pariwisata dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten tidak hanya dari website Pemerintah Kabupaten Bengkalis saja, tapi dinas dan lembaga lain seperti Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas Pemberayaan dan lain-lainnya haruslah bersinergi, misalnya di pusatkan. Komunikasi dalam pengembangan potensi pariwisata tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur di pulau tersebut, jadi pesan keparwisataan harus masuk di Dinas Pekerjaan Umum. Saat ini untuk listrik sudah hampir menjangkau seluruh kawasan di Rupat, demikian juga dengan jaringan telekomunikasi, hanya tinggal pembangunan atau peningkatan jalan lingkar serta jalan poros di Pulau Rupat sebagai utama untuk menuju lokasi destinasi wisata.

Koordinasi antar lembaga yang mengelola sumberdaya komunikasi terkait keparwisataan di Kabupaten Bengkalis penting karena keberadaannya akan mempengaruhi pengelolaan sumber daya komunikasi yang ujungnya kelemahan dalam mengelola sumber daya alam potensi wisata yang ada. Hal ini terlihat terbengkalainya aset-aset yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mendukung pariwisata, banyak bangunan yang sudah diselesaikan namun keberadaannya tidak berfungsi dan tiak terpakai.

7. Merencanakan Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi komunikasi pariwisata pemerintah dalam pembangunan objek wisata menjadi sangat penting saat ini. Banyak kegiatan dan infrastruktur tidak bermanfaat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan bernilai guna karena sering kali salah sasaran. Banyak sarana penunjang keparwisataan dibangun, namun pemeliharaan tidak dilakukan untuk kesinambungan dan pemantapan pariwisata seperti di Rupert Utara dan Selat Baru. Keberadaan fasilitas mulai dari kebersihan, fasilitas, dan promosi harus terus dilakukan. Peningkatan kunjungan sering fasilitas tidak memadai terutama pada saat mendekati weekend atau libur sekolah. Selain itu juga dapat dilakuka upaya seperti, mendorong kerjasama dengan Kabupaten-Kabupaten tetangga, membuat peta wisata, meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga nonpemerintah dalam mengontrol tingkah laku para wisatawan yang datang ke Rupert Utara

Evaluasi juga wajib dilakukan dengan membungkus semua masalah-masalah atau kekurangan yang dihadapi pihak wisatawan maupun pengelola, kemudian memberi solusi atas masalah dan tindakan atas solusi tersebut. Untuk itu perlu kita kenali kenali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pariwisata Rupert Utara, agar pariwisata Rupert Utara semakin berkembang dan maju kedepannya dengan rencana dan strategi yang matang serta dukungan Pemerintah Daerah dan kerja keras masyarakat setempat.

5.3 Evaluasi Komunikasi ParwisataPemerintah Kabupaten Bengkalis

Evaluasi kegiatan komunikasi parwisata masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah. Keberadaan objek wisata yang dikembangkan tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Branding destinasi wisata pulau Rupert dan Selat Baru sudah banyak ada di benak masyarakat luar kabupaten Bengkalis, namun hal yang tidak banyak dievaluasi adalah kenyamanan ketika saat berkunjung dan berada di lokasi wisata tersebut. Berbagai keluhan muncul seperti: akses jalan yang sulit, fasilitas yang tidak memadai, dan infrastruktur yang masih kurang adalah beberapa contoh pesan komunikasi parwisata yang harus dievaluasi.

Keunggulan Pantai Rupert Rupert Utara dan Pantai Selat Baru memiliki kekuatan sebagai destinasi wisata yaitu meliputi kekayaan akan budaya, keindahan alam pantainya, masyarakat yang ramah, dukungan yang positif dari pemerintah setempat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dan masyarakatnya. Pantai Selat Baru memiliki Jarak yang sangat dekat dengan pelabuhan internasional yang telah tersedianya kantor keimigrasian sehingga sistim kontrol terhadap wisatawan asing semakin baik, berbatasan dengan selat malaka dan merupakan jalur transportasi internasional. Selain itu, kondisi kecamatan rupa utara relatif aman bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata, keberadaan lembaga adat dan agama yang masih diakui oleh masyarakat setempat khususnya di desa-desa, dan akses internet yang telah tersedia.

Keunggulan tersebut menjadi berkurang ketika kelemahan yang dimiliki destinasi pariwisata di kabupaten Bengkalis tidak dikelola dengan tepat. Beberapa faktor penghambatnya adalah minimnya layanan transportasi umum, sarana dan infrastruktur jalan darat yang belum baik, keterbatasan dalam akomodasi terutama di wilayah pedesaan, belum tersedianya *money changer*, tidak memiliki museum untuk peninggalan sejarah, fasilitas kesehatan yang minim seperti rumah sakit umum, tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk masih rendah, kualitas SDM UPTD pariwisata dan kebudayaan dan olahraga tidak memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang kepariwisataan, belum banyak tersedianya penjualan sofenir atau kerajinan.

Evaluasi komunikasi pariwisata dalam pembangunan destinasi wisata di Bengkalis yaitu pantai Rupa Utara dan Pantai Selat Baru masih kurang dilakukan. Setiapnya pemerintah dapat melakukan survei atau penelitian bagi pembangunan dan perkembangan destinasi wisata tersebut. Berdasarkan pengamatan, banyak keinginan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi terhambat oleh infrastruktur jalan yang tidak menunjang. Padahal jalan yang bagus dapat menjadi kekuatan penarik wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata yang mereka akan kunjungi.

Di sisi lain, destinasi wisata yang sudah dibangun tidak menyediakan kegiatan wisata alam atau kegiatan wisata budaya pendukung. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap objek wisata yang sudah dibangun kurang ditunjang, meskipun sudah dibuat master plan akan dibangunnya pelabuhan khusus kapal pesiar di Teluk Rhu, kebijakan perundang-undangan yang mendukung, meningkatnya jumlah wisatawan dimasa yang



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

akan datang, ketertarikan investor dalam menanamkan investasi. Namun dalam realisasinya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat dan wisatawan.

Pembangunan pariwisata tidak akan mungkin terlaksana dengan baik tanpa melibatkan stakeholder seperti investor. Ketakutan yang ada di masyarakat adalah penguasaan tanah oleh investor secara besar-besaran, dapat menjadikan masyarakat tergusur dan bahkan dapat merusak keindahan alam dan kelestarian alam. Masih ada ketakutan di kalangan masyarakat akan adanya budaya-budaya negatif yang mempengaruhi masyarakat sekitar. Bahkan dengan masuknya tenaga-tenaga terampil dari luar daerah akan menggeser kedudukan tenaga kerja lokal, sehingga privatisasi obyek wisata yang berlebihan dapat membuat masyarakat dimarginalkan.

Dalam hal ini Disbudparpora menggunakan jenis pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung digunakan untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu kegiatan yang sedang dikerjakan secara langsung. Pimpinan dan jajaran aparat dikedinasan melakukan evaluasi dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan ini berwujud inspeksi langsung dari kepala daerah yaitu Bupati, atau bupati terhadap bawahannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Disparbudpora dalam kegiatan komunikasi keparwisataan dapat dilakukan setidaknya sekali dalam satu bulan. Pengawasan tidak selalu dengan cara mendatangi atau menemui Pokdarwi atau ke pemerintah desa langsung, tetapi juga dengan melihat kunjungan wisatawan. Memang ada juga dilakukan evaluasi dengan cara mengirimutusan atau orang bertugas untuk mengunjungi lokasi wisata secara langsung untuk menilai dari sisi pelayanannya kepada wisatawan, yang ditujukan kepada pihak hotel, pedagang dan masyarakat itu sendiri. Pelayanan ini dilihat juga dari sisi koordinasi pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang terkait alam kegiatan pariwisata. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Bengkalis:

“pengawasan yang kami lakukan tidak selalu datang ketempatnya langsung, tapi kami bisa lihat data kunjungan wisatawan, bisa juga mengirim orang kesana untuk menilai dari sisi pelayanannya, ini pelayanannya dilihat dari sisi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

koordinasi”.

Pengevaluasian kegiatan keparwisataan juga dilakukan secara tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan baik itu tertulis maupun lisan. Bentuk dari pertanggungjawaban ini berupa laporan pelaksanaan dana, laporan pemasukan dana, dan laporan kunjungan. Laporan pelaksanaan dana yaitu laporan penggunaan dana yang diberikan oleh UPT yang berisi rekapitulasi penggunaan dana dalam proses pengembangan. Untuk akhirnya sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kabupaten Bengkalis semua tergantung pada jumlah pengunjung. Kalau kunjungan meningkat menandakan keberhasilan dalam upaya pengembangan.

Evaluasi kegiatan pembangunan komunikasi keparwisataan juga dilakukan dengan proses menelaah kebijakan, program, ataupun kegiatan yang berjalan berdasarkan konteks, relevansi, dampak dan *outcomes*, keberlanjutan, efektivitas dan efisiensi berdasarkan data dan informasi yang kredibel (Primahendra, 2015). Dalam hal ini evaluasi yang dilakukan belum ada karena program ini masih dalam proses pengembangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen bahwa “mengenai proses evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan program yang telah dilakukan belum ada juga masalah itu Bu”.

Melalui evaluasi, program-program yang sudah dilakukan dapat dinilai efektivitasnya sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat rancangan perencanaan untuk program yang akan datang. Melalui evaluasi pula, sumber daya organisasi akan mengetahui kelemahan, kekurangan, kekuatan, dan kesempatan dalam implementasi program yang telah dilakukan, bagian program mana yang bisa dipertahankan, ditingkatkan, atau bahkan dihapuskan untuk dapat mengatur efisiensi anggaran. Sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menjadi bahan untuk membuat sebuah kebijakan baru terhadap permasalahan yang dihadapi atau isu yang harus segera ditangani.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.4 Model Komunikasi Parwisata dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis

Kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menentukan segala aktivitas masyarakat, termasuk dalam kegiatan keparwisataan seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 10 tentang keparwisataan. Pembangunan keparwisataan di kabupaten bengkalis mendapatkan dukungan dari masyarakat, meskipun dukungan itu belum sepenuhnya didapat dari pemangku kepentingan yang ada. Masyarakat menjadi modal utama karena menjadi salah satu unsur utama, sehingga perlu diberdayakan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pemberdayaan masyarakat melalui Pokdarwis ini belum berperan maksimal karena pembinaan pemerintah yang masih kurang, sehingga hanya ada sedikit yang aktif dari sekian banyak yang sudah di SK-kan oleh pemerintah daerah, yaitu delapan Pokdarwis sesuai SK Kepala Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis nomor: 12a/KPTS/I/2016.

Pemerintah Bengkalis mengharapkan Pokdarwis ini dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mendukung kegiatan keparwisataan, menciptakan lingkungan dan daya tarik wisata setempat melalui sapta pesona, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota pokdarwis, mengumpulkan dan mengelola informasi keparwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat, serta memberikan masukan kepada pemerintah atau pihak yang terkait. Hingga saat ini masih bertambah terus Pokdarwis di Kabupaten Bengkalis. Namun yang aktif dan mendapatkan penghargaan hingga tingkat provinsi yaitu Pokdarwis Pantai Tanjung Lapin yang beralamat di jalan Tanjung Lapin Desa Tanjung Punak, Rupert Utara.

Pembentukan Pokdarwis ini juga disesuaikan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan parwisata. Selain itu juga didukung oleh peraturan menteri kebudayaan dan parwisata nomor PM.04/UM.001/MKP/08 Tentang Sadar Wisata. Hal ini juga didukung dengan pembuatan buku pedoman Kelompok Sadar Wisata oleh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2012. Di dalam buku pedoman ini sudah lengkap dijelaskan latar belakang tujuan dibentuk, organisasi, proses pembentukan dan pembinaan Pokdarwis. Bahkan di dalam buku tersebut juga dijelaskan formulir data pendaftar kelompok sadar wisata, formulir data wisata hingga surat keputusan Kepala dinasnya.

Dalam manajemen komunikasi, pada aspek perencanaan, sumber daya menyusun perencanaan untuk komunikator, pesan, media, khalayak (komunikan) dan rencana pengaruhnya atau efek (Suprpto, 2011: 140). Kegiatan perencanaan menjadi salah satu hal yang penting dalam perencanaan kebijakan pengembangan potensi destinasi wisata di Kabupaten Bengkalis. Perencanaan komunikasi, perlu untuk mengidentifikasi stakeholders dan kebutuhannya serta menentukan bagaimana mencapainya. Kegiatan perencanaan disini berupa bentuk persiapan dalam pengembangan potensi Desa wisata di Kabupaten Bengkalis.

Hal ini dimulai dari pemetaan terhadap potensi sumber daya alam di beberapa Desa yang layak untuk dikembangkan menjadi kawasan pengembangan kawasan desa wisata tidak hanya dilakukan dengan tujuan kegiatan satu wisata saja yaitu wisata bahari tetapi juga bisa melaksanakan kegiatan wisata dengan tujuan yang lain seperti kegiatan wisata rekreasi, lingkungan, seni dan budaya, dan kegiatan wisata sejarah. Selain telaah analisis pemetaan potensi pengembangan kawasan desa wisata, maka kegiatan perencanaan juga dilakukan dengan telaah analisis terhadap kesiapan *stakeholder* masyarakat, pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung pengembangan potensi kawasan Desa wisata di Kabuapten Bengkalis. Kemudian perencanaan pengembangan potensi Desa Wisata ini juga didukung adanya perencanaan penganggaran dan pada Anggaran APBD Kabupaten Bengkalis. Peran penting pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata adalah menyediakan anggaran guna peningkatan semua aspek baik pokok maupun pendukung dalam pengembangan pariwisata. Diakui bahwa masalah anggaran merupakan masalah klasik pemerintah, oleh sebab itu perlu kolaborasi antar struktur pemerintahan dalam



pengalokasian anggaran guna pengembangan kawasan wisata di daerah termasuk desa wisata di Kabuapten Bengkalis.

Tahapan pengorganisasian adalah langkah lanjutsebagiaibentuk perwujudan dari perencanaan. Pengorganisasian berfungsi untuk memberikan atau mendistribusikan tugas atau wewenang/tanggung jawab dan sistem komunikasi serta mengkoordinasi kerja setiap bawahan di dalam suatu tim agar terorganisir dengan baik (Suprpto, 2011: 131). Pengorganisasian komunikasi menurut Suprpto (2011) juga melibatkan aspek komunikator, pesan, media, khalayak dan pengaruh yang diinginkan.

Tahapan lainnya yang dilakukan setelah perencanaan dalam pengembangan potensi Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis adalah melakukan kesiapan pengorganisasian aktivitas komunikasi dalam pengembangan desa wisata. Melalui kesiapan lembaga struktural untuk pengembangan potensi Desa Wisata di Kabuapten Bengkalis dapat direalisasikan secara optimal. Penggorganisasian pada manajemen pengembangan Potensi Desa Wisata Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini komunikator utamanya adalah Bidang Pariwisata Disparbudpora yang membawahi Pemerintah Desa yang memiliki potensi pariwisata pedesaan. Pemerintah Desaakan membawahi kelompok sadar wisata untuk mengelolapariwisata pedesaan.

Pelaksanaan merupakan tahapan untuk merealisasikan rencana kerja seperti yang telah ditetapkan. Maksud dari pelaksanaan ini adalah membangun system mekanisme kerja, agar rencana kerja terealisasi dengan baik. Pelaksanaan adalah sebagai perwujudan perencanaan. Keikutsertaan kedua belah pihak dalam penyelenggaraan kegiatan sangat diperluukan. Penggerakan/Aksi komunikasi dalam manajemen komunikasi merupakan arahan nyata yang diberikan kepada setiap unsur-unsur komunikasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan program.

Pelaksanaan pengembangan potensi desa wisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh visi Kepala Desa yang berorientasi kepada orientasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kewisataan dan didukung oleh anggaran dari pemerintah Pusat dan daerah berupa dana alokasi desa dan dana pengembangan desa lainnya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan desa wisata terpadu mampu terwujud dengan adanya keinginan bersama dari *stakeholder* dan pelibatan masyarakat lainnya.

Pengawasan dan evaluasi sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud untuk mengarahkan pada tujuan yang telah digariskan pada program awal. Proses pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk memantau pelaksanaan kegiatan. Tahap pengawasan dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan oleh Disparbudpora Kabupaten Bengkalis dikarenakan program ini baru dimulai dan belum sepenuhnya mendapat dukungan dari, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pelaksanaan pengembangan potensi Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis ini.

Pelibatan aktif dari Badan Pengelolaan Wisata Kabupaten Bengkalis menjadi sangat penting dalam pengawasan dan evaluasi dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya tahapan pengawasan dan evaluasi tersebut mampu menjadi bahan masukan dan saran untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas dari pelaku wisata di Kabupaten Bengkalis dan hal ini dapat berkontribusi terhadap model pengembangan kawasan desa wisata di Kabupaten Bengkalis secara terpadu.

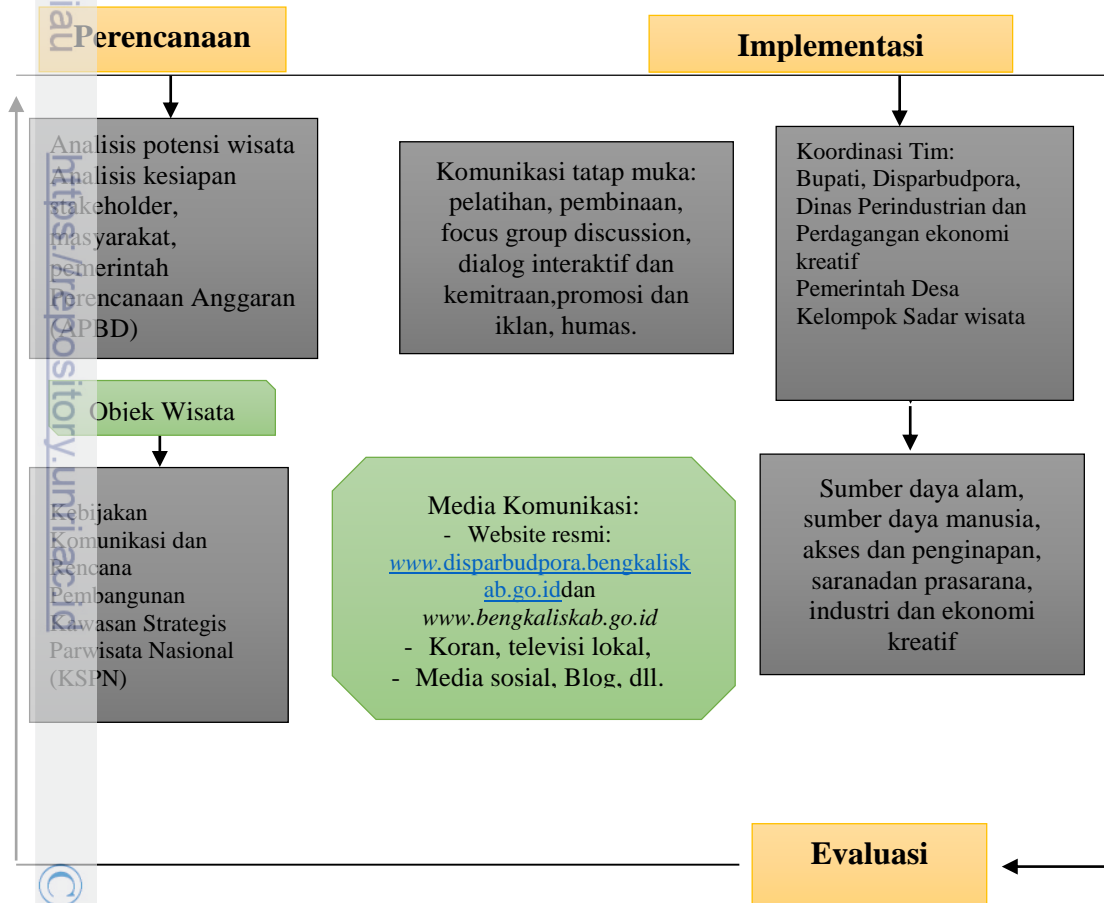
Suatu organisasi/ instansi merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sistem akan menghubungkan semua lingkungannya baik itu lingkungan internal maupun eksternal, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut harus adanya tata kelola yang baik dalam setiap hubungan dan interaksi, dalam hal ini manajemen sangat diperlukan agar dapat mencapai tahap demi tahap target dan sasaran yang telah dibentuk. Suatu hubungan dan interaksi tersebut akan terbentuk melalui komunikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki peranan penting sebagai penggerak aktivitas dalam proses manajemen. Dengan kata lain, suatu organisasi/ instansi harus memiliki pola



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

manajemen komunikasi yang baik, komunikasi dalam tahap perencanaannya, komunikasi dalam tahap pengorganisasiannya, komunikasi dalam tahap pelaksanaannya, dan komunikasi dalam tahap pengawasan dan evaluasinya.

Gambar:
Model Komunikasi Parwisata di Kabupaten Bengkalis



Model komunikasi parwisata yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Bengkalis menyesuaikan pada ketentuan kebijakan pemerintah pusat, dan diikuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini bisa terlihat dari perencanaan yang selalu ditentukan berdasarkan pada kawasan strategis parwisata nasional (KSPN). Selain itu kebijakan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga didasarkan pada kebijakan pemerintah yaitu dengan membina Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).



Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) terbentuk untuk membantu kesuksesan parwisata di Kabupaten Bengkalis. Sesuai ketentuan yang ada dalam surat Keputusan Kepala Dinas, kelompok sadar wisata ini memiliki tugas yaitu:

1. Mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan keparwisataan.
2. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan lingkungan dan daya tarik wisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan sapta pesona.
3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang keparwisataan
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha parwisatadan usaha terkait lainnya.
5. Mengumpulkan, mengelola dan memberikan pelayanan informasi keparwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
6. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah maupun pihak terkait dalam mengembangkan keparwisataan.

Keberadaan Pokdarwis ini di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan keseluruhan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Nomor 120/KPTS/2016 menetapkan ada tujuh kelompok sadar wisata, yaitu dua Pokdarwis di Kecamatan Rupat Utara dan empat Pokdarwis di Selat Baru Kecamatan Bantan.

Kelompok sadar wisata Pantai Tanjung Lapin di Kecamatan Rupat Utara dibentuk dengan tujuan menghimpun potensi yang ada bersama-sama mengupayakan kesejahteraan anggota menunjang pemerintah dalam menagani isu-isu di bidang keparwisataan yang ada ditingkat lokal dan kemasyarakatan. Tujuan lainnya antara lain yaitu berpartisipasi aktif dalam mengusahakan dan megembangkan terciptanya masyarakat cerdas dan trampil, menciptakan kader-kader generasi muda yang berwatak dan berpotensi sera berwawasan luas, membantu pemerintah dan masyakat serta turut



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

aktif dan kreatif dalam mempromosikan parwisata di Pulau Rupat dan Rupat Utara; Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan dan memberikan perlindungan dalam mengembangkan potensi parwisata serta membantu meningkatkan akselerasi pelaksanaan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan objek wisata di Pulau Rupat dan Rupat Utara. Pokdarwis pantai Tanjung Lapin Desa Tanjung Punak berbentuk perkumpulan yang tujuannya juga untuk mempererat persatuan dan mengembangkan kepedulian di antara para anggotanya, memelopori pengembangan beragam potensi wisata di lingkungan terdekat atau di tingkat desa dan melestarikan nilai-nilai seni, budaya, adat, dan sejarah lokal yang mendukung kemajuan di bidang keparwisataan yang berdampak positif secara ekonomi dan sosial pada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan organisasi, Pokdarwis Pantai Tanjung Lapin menyelenggarakan berbagai usaha-usaha yang terkait dengan pengembangan beragam potensi di bidang keparwisataan di tingkat lokal dan mendorong terlaksananya event-event yang menjadi wahana apresiasi dan promosi potensi parwisata yang ada di Pulau Rupat, seperti: menyelenggarakan pesta Mandi Safar, Festival permainan rakyat, festival kegiatan bahari, perlombaan seni dan olah raga, pameran/bazar, perkemahan, dan pertunjukan atau show. Pokdarwis ini memiliki kegiatan yaitu membina dan memberikan pelatihan kualitas masyarakat khususnya generasi muda dalam bidang pariwisata; menghimpun, merumuskan, memperjuangkan dan mendayagunakan segala potensi generasi muda; mendirikan/menyelenggarakan prasarana dan melaksanakan jasa pendukung lainnya untuk memberdayakan bakat/keahlian pemuda dalam bidang pariwisata; melaksanakan kerjasama dan membina hubungan baik dengan lembaga pemerintah maupun swasta serta organisasi-organisasi formal maupun nonformal guna terwujudnya program; melakukan pembersihan peningkatan bidang usaha keterampilan, produk makanan, souvenir dan usaha-usaha lainnya; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan memberdayakan sumber daya manusia dan turut berperan aktif menciptakan keamanan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Model komunikasi parwisata dalam memberdayakan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari mempromosikan destinasi pariwisata itu sendiri. Baik pantai Rupat sebagai unggulan atau pantai Selat baru sebagai tambahan. Sayangnya kegiatan komunikasi parwisata pemerintah tidak maksimal, di sisi lain kegiatan masyarakat masih dilakukan tidak dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan pihak pemerintah, sehingga identik pengembangan parwisata hanya dilakukan mandiri oleh masyarakat. Terkait dengan model komunikasi parwisata Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini, pemerintah hendaknya melakukan pengembangan wisata budaya dan wisata bahari (ekowisata) secara terintegrasi; Melakukan upaya mengurangi jarak tempuh dan memperbaiki fasilitas publik yang mendukung wisatawan ke objek-objek wisata yang ada; Meningkatkan promosi wisata melalui media sosial dengan tagline dan hastag yang sama; Mempercepat pembangunan infrastruktur akses darat dan laut antar daerah wisata dan antar kecamatan; Meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga non Pemerintah dalam mengontrol tingkah laku para wisatawan yang datang ke Rupat Utara; Mendorong kerja sama dengan kabupaten-kabupaten tetangga; Membuat peta wisata pantai Rupat Utara yang bisa menjadi pedoman wisatawan; dan Pemberdayaan masyarakat lokal terutama di sekitar objek wisata baik masyarakat petani, pedagang, maupun profesi lainnya.

Pengembangan Destinasi parwisata di daerah ini juga dapat dilakukan dengan cara mengembangkan atraksi budaya lama seperti: Zapin Api, Mak Yong, Joged Dankong, Sepak takraw, dll. Pengembangan destinasi juga dilakukan dengan cara membuat konservasi hutan mangrove, jelajah hutan, kearifan tradisional dan mengenalkan makanan atau kuliner tradisional tempatan. Pembangunan akses parwisata dilakukan dengan peningkatan jalan di dalam objek wisata, peningkatan jalan menuju objek wisata dan pembangunan jalan antar kota atau membangun pelabuhan. Peningkatan amenities objek wisata melalui penyediaan fasilitas utama seperti jalan, atraksi alam dan budaya, fasilitas gazebo, tempat parkir, turap, dan tempat duduk. Penyediaan fasilitas pelengkap seperti penginapan, keamanan, outlet, hiburan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

karaoke, rumah makan, garu pandang, dan lain-lain. Selain itu dengan cara menyediakan fasilitas penunjang seperti ATM, apotik, bengkel, tempat penukaran uang dan penyewaan kendaraan. Pemberdayaan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan baik untuk atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Masyarakat juga sebagai pelaksana dan pengelola wisata pantai rupat Utara. Evaluasi juga dengan cara melibatkan untuk menjaga, memperbaiki dan mengawasi pariwisata Rupat Utara. Investasi pemerintah yang tepat dapat dilakukan dengan perencanaan, pembangunan dan pendampingan masyarakat dalam setiap kegiatan wisata yang terkait. Swasta dapat menjadi motor penggerak dari kegiatan ekonomi yang ada di objek wisata. Sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dan investasi dalam ekonomi, lingkungan dan budaya.

Kegiatan komunikasi keparwisataan pemerintah kabupaten Bengkalis ranangan dalam pembangunan kelembagaan untuk pembangunan keparwisataan di daerah tersebut hanya mengandalkan pada Pokdarwis. Sementara Pokdarwis sangat mengandalkan pada anggaran dan bantuan pemerintah. Masyarakat kurang diberdayakan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Di sinilah letak kelemahan pembangunan komunikasi pariwisata dalam membangun kesadaran wisata masyarakat.

Pembangunan industri pariwisata masih belum didukung kesadaran masyarakatnya untuk membangun daerahnya sebagai destinasi wisata di Kabupaten Bengkalis. Adapun pola pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Bengkalis adalah dengan cara. *Pertama*, Struktur Industri Pariwisata dilakukan dengan cara pendampingan pariwisata, pemodalan pariwisata, pelatihan pariwisata, pengorganisasian pariwisata. *Kedua*, Daya saing produk wisata dilakukan dengan cara: pelatihan usaha pariwisata, pelatihan produksi produk, pelatihan pemasaran produk, dan pelatihan manajemen produk. *Ketiga*, Kemitraan usaha dilakukan dengan tujuan kelompok masyarakat seperti pengerajin, pengusaha kuliner, pemilik akomodasi dan pengusaha usaha perjalanan Wisata (UPW).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Keempat, untuk menjamin bisnis parwisata terjaga kualitasnya, pemerintah berusaha menjaga kredibilitas bisnis parwisata dengan cara: melakukan sertifikasi parwisata, menjaga keamanan lingkungan wisata, menjaga keamanan atraksi dan hiburan serta melakukan mendapatkan sertifikat BPOM untuk menjaga kelayakan makanan. *Kelima*, tanggung jawab terhadap lingkungan dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup; Lembaga Sosial, Adat dan Budaya; keamanan (Kepolisian Satpol PP, dll; dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan.

Dalam hal ini, model komunikasi parwisata yang tepat sangat penting untuk dikembangkan karena akan berimplikasi praktis dalam pembangunan destinasi wisata dan masyarakat lokal di daerah tersebut. Penetapan branding “Melayu Bahari” dengan menempatkan Pulau Rupat dan pantainya sebagai unggulan wisata Bengkalis memang pantas dikembangkan menjadi pulau destinasi wisata. Jadi komunikasi pembangunan parwisata tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada dinas parwisata, melainkan harus melibatkan semua instansi terkait dan melibatkan semua komponen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam parwisata Bengkalis. Oleh karena itu, sebagai pihak yang berkewenangan, Dinas Pariwisata Bengkalis harus kreatif dalam mengembangkan destinasi wisata dengan mensinergikan pada program-program yang ada dan dinas atau instansi yang lain. Komunikasi parwisata yang kreatif dan pembangunan yang berkelanjutan akan dapat mengatasi masalah yang dihadapi.